

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Adiministrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Budiarto, Agus, 2002, *Seri hukum Perusahaan (kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*, Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyo, Stefanus Mahendra Soni, 2016, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kie, Tan Tong, 2007, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nadapdap, Binoto, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas (berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Aksara, Jakarta.
- Notodisuryo, Raden Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2012, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara: Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.
- Perangin-angin, Effendi, tanpa tahun, *Pembuatan Akta 1*, tanpa penerbit.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum*, UI Pres, Jakarta 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjirtosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Tim penyusun naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Tobing, GHS Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Widjaja, Gunawan & Ahmada Yani, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 1958/127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2116 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 194 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2016 tentang Agen Perantara Pedagang Efek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5896.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1385.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1537.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1539.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,

Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1727.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

### **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 49/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 72/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 22/PUU-XVII/2019.

Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Republik Indonesia Nomor: 111/G/2009/PTUN-JKT.

Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Republik Indonesia Nomor: 10/B/2010/PT.TUN.JKT.

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Republik Indonesia Nomor: 259/Pid.B/2015/PN.Cjr.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Republik Indonesia Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Republik Indonesia Nomor: 105/G/2019/PTUN-JKT.

Putusan Tata Usaha Jakarta Republik Indonesia Nomor: 196/G/2019/PTUN-JKT.

### **D. INTERNET**

Admin, tanggal 12 September 2018, “Penerapan Unggah Akta (Upload Akta) Perseroan Terbatas Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Ahu Online”, dalam <https://portal.ahu.go.id/id/detail/84-ahu-web/1311-penerapan-unggah-akta-upload-akta-perseroan-terbatas-dalam-sistem-administrasi-badan-hukum-ahu-online> diakses tanggal 30 Juli 2020 pukul 21:01 WIB.

Admin, 15 Februari 2018, “Berapa Jumlah Kuorum Dalam Penyelenggaran RUPS?” dalam <https://dunianotaris.com/berapa-jumlah-kuorum-dalam-penyelenggaran-rups.php#:~:text=Kuorum%20merupakan%20suatu%20presentase%20di,hak%20suara%20hadir%20atau%20diwakili.>, diakses 14 Oktober 2020 pukul 22:56 WIB.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 19 Juli 2017, “Siaran Pers Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017” dalam, <https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/kewenangan-legal-administratif-kemenkumham-sebagai-tindak-lanjut-perppu-nomor-2-tahun-2017> diakses 04 Desember 2020 pukul 00:28 WIB.

CNN Indonesia, 04 November 2019 “Aturan Digodok, OJK Bisa Paksa Bank Konsolidasi” dalam, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191104122500-78-445402/aturan-digodok-ojk-bisa-paksa-bank-konsolidasi> diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 23:30 WIB.

ILUNI UI, 13 September 2017, “Press Release Ikatan Alumni Universitas Indonesia Terkait Pencabutan Pengesahan Akta Badan Hukum Perkumpulan ILUNI UI”, dalam, <https://www.facebook.com/iluni.ui/posts/press-release-ikatan-alumni-universitas-indonesiaterkait-pencabutan-pengesahan-a/1628173160547321/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 01:52 WIB.

Juliandy Dasdo Tambun, 08 September 2014, “Putusan Perkara Perdata sebagai Alat Bukti”, dalam, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d5e034652f7/putusan-perkara-perdata-sebagai-alat-bukti/> diakses tanggal 30 Desember 2020, pukul 10:36 WIB.

Letezia Tobing, tanggal 29 Agustus 2016, “Prosedur Jika Terdapat Kesalahan Dalam Akta Notaris”, dalam, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51e49bda7e30d/prosedur-jika-terdapat-kesalahan-dalam-akta-notaris/> diakses tanggal 12 Oktober 2020 pukul 23:41 WIB.

Norman Edwin Elnizar, 11 September 2017, “9 Standar Etika Pelayanan Notaris yang Harus Tetap Dijaga” dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59b61fe5d58d8/9-standar-etika-pelayanan-notaris-yang-harus-tetap-dijaga/> diakses tanggal 26 November 2020, pukul 22:40 WIB.

NPP, tanggal 08 Maret 2016, “Catat! Notaris “Dikawal” Dua Lembaga Etik”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/> diakses tanggal 2 Januari 2021 pukul 00:31 WIB.

Redaksi, tanggal 29 Oktober 2019, “Komitmen Notaris Menjaga Jabatan Dengan Etika Moral Tinggi”, dalam <https://notarymagazine.com/komitmen-notaris-menjaga-jabatan-dengan-etika-moral-tinggi/>, diakses tanggal 26 November 2020 pukul 21:49 WIB.

Riki Triyansyah, 07 Juli 2020, “Sosialisasi Permenkumham 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Secara Virtual”, dalam, <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-permenkumham-15-tahun-2020-tentang-tata-cara-pemeriksaan-majelis-pengawas-terhadap-notaris-secara-virtual>, diakses tanggal 20 Desember 2020, pukul 22:04 WIB.

Pieter Latumeten, tanggal 24 April 2018, “Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris”, dalam <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses tanggal 15 November 2020 pukul 14:08 WIB.

Tanpa penulis, tanpa tahun, “Ini Beberapa Maskapai yang Dipaksa Merger oleh Kemenhub”, dalam, <https://airport.id/ini-beberapa-maskapai-yang-dipaksa-merger-oleh-kemenhub/> diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 23:29 WIB.

## **E. THESIS**

Komang Ayu Lestari, “Kajian Terhadap Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum dan HAM RI Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum”, *Tesis*, Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, 2017.

Dedy Ahmad Wiryadi, “Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pendirian”, *Tesis*, Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2015.

Tia Sanitra Gumilang, “Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Nur Ami Azyati, “Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman hukuman Kurang Dari Lima Tahun”, *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2015

#### **F. Jurnal**

Andhika Prayoga & Muhammad Sya’roni Rofii, “Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Bulan Juni, Tahun 2020.

Astari Priyandini, “Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 April Tahun 2018.

Amrina Khairi Ilma, Pieter E. Latumenten, Widodo Suryandono, “Konstruksi Perubahan Isi Dan Pembetulan Kesalahan Tulis Dan/Atau Ketik Dalam Akta Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VII/2019)”, *Indonesian Notary Jurnal*, Volume 1, Nomor 004, Tahun 2019.

Debby Dwi Arlingga, “Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan”, *Lex Renaissance*, Nomor 2, Volume 2, bulan Juli, Tahun 2017.

Dedy Prasetyo Winarno, “Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian”, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2015.

Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P, Widodo Suryandono, “Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa)”, *Indonesian Notary*, Volume 1, Nomor 002, Tahun 2019.

H. Neris, “Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (Studi Normatif Terhadap Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dari Perspektif Asas Hukum Audi Et Alteram Partem dan Voluntair)”,

*Nestor Jurnal Hukum PMIH Universitas Tanjungpura Pontianak*  
Tahun 2009.

Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, dan Nurul Ghufon, “Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, April-September 2017.

Ira A.Penn, “Pengelolaan Dan Jaminan Keamanan Arsip Vital Kantor Notaris”, *Al-Maktabah*, Volume 18, Desember, Tahun 2019.

Irma Shinta Wiranti, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut”, *Jurnal Kenotariatan Narotama*, Volume 1, Nomor 2, bulan Agustus, Tahun 2019.

Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, dan Nurul Ghufon, “Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara”, *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, April-September 2017.

Nelly Juwita, “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya: Calyptra*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013.

Maleakhi W. Sitompul, “Pencatatan Perubahan Direksi Di Kementerian Terkait Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Kewenangan Direksi”, *Jurnal Darma Agung*, Volume 28, Nomor 3, bulan Desember, Tahun 2020.

Maya Malinda Panjaitan. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta”, *Premise Law Jurnal*, Volume 14, Tahun 2017.

Ria Oktavia, “Akibat Hukum Perbedaan Data Perseroan Terbatas Antara Akta Notaris Dan Daftar Perseroan”, *E- jurnal: Spirit Pro Patria* Volume V, Nomor 1, bulan Maret, Tahun 2019.

Rio Christian, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo”, *Jurnal Yudisial*, Volume 11, Nomor 3 Tahun 2018.

Sukirman, “Implementasi PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan Peleburan Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dengan Berlakunya UU No. 40 Tahun 2007”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor, bulan Januari, Tahun 2010.

Yasin Tanaka, “Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV, Nomor, 1, Bulan Januari –Juni, Tahun 2017.

Yoefanca Halim, Fricky Sudewo & Tyas Fidelia, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember, Tahun 2019.

#### **G. MAJALAH**

M Lutfi Chakim, “*Contrarius Actus*”, *Majalah Konstitusi edisi Nomor 126 Agustus Tahun 2017*.

#### **H. WEBINAR**

Subianta Mandala, Zoom meeting, “Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatan, Program Studi Magister Kenotariatan dan Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 02 Desember 2020 pukul 09.00-10.00.